

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Saifuddin, 1998, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang.
- _____, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi dan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadisoeparto, Hartono, 2000, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hutagulung, Sophar Maru, 2010, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joeniarto, *Negara Hukum*, 1968, YBP Gajah Mada, Yogyakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Lexy, J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Maria, SW. Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Hukum penelitian*, Citra ditya Bakti, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung.

_____, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik dan Permasalahannya*, P.T.Alumni, Bandung.

Peter, Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Rasyid, Roihan, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara Manusia Indonesia dan Perilaku Politik)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Siregar, Doli D, 2004, *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soedarto, 1981, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Tandra, 2010, Sridjaja Pradjonggo, *Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya.

Wiyono, R, 2016, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zen, A. Patra M., 2021, *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik atas Harta Kekayaan dalam Perkara Pidana*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Zulkarnain, 2016, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5074.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076.

Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 98/Pdt.P/2017/PN.Bna perihal Permohonan yang diajukan oleh Nyonya Nurshanti Binti Adnan Hanafiah, dkk dkk terhadap perampasan dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN-BNA, 14 Juli 2017.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 876.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1948 K/Pdt/2015 perihal kasasi Perlawanan yang diajukan oleh Tri Subuh Fajarwati terhadap perampasan dalam Putusan Nomor 1153K/Pid/2005, 26 November 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2669 K/PID.SUS/2015 perihal kasasi perkara Permohonan yang diajukan oleh PT Nindya Karya terhadap perampasan dalam Putusan Nomor 86/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST, 1 Agustus 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2701 K/Pdt/2017 perihal kasasi perkara Perlawanan yang diajukan oleh Tn. Toni Handani terhadap perampasan dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdo, 11 Desember 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3563K/Pdt/2016 perihal kasasi perkara Perlawanan yang diajukan oleh Supriyanto terhadap perampasan dalam Putusan Nomor 1153K/Pid/2005, 30 Maret 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-16-019/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 Desember 2006.

Putusan Pengadilan Negeri Bitung dalam Putusan Nomor 70/Pdt.BTH/2015/PN.Bit perihal Perlawanan yang diajukan oleh Tn. Toni Handani terhadap perampasan dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdo, 1 Maret 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 02/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw perihal Perlawanan yang diajukan oleh Tri Subuh Fajarwati terhadap perampasan dalam Putusan Nomor 1153K/Pid/2005, 10 Juni 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 38/Pdt.Plw/2015/PN.Bdw perihal Perlawanan yang diajukan oleh Supriyanto terhadap perampasan dalam Putusan Nomor 1153K/Pid/2005, 10 Maret 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp perihal Gugatan yang diajukan oleh I Nengah Nata Wisyana terhadap perampasan dalam Putusan Nomor 2964K/PID.SUS/2015, 3 Mei 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 57/Pdt.G/2017/PNSrp perihal Gugatan yang diajukan oleh I Ketut Rugeg terhadap perampasan dalam Putusan Nomor 2964K/PID.SUS/2015, 19 Desember 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 750/Pdt.PLW/2006/PN.Sby perihal Perlindungan yang diajukan oleh Saidan Simanjuntak terhadap perampasan dalam Putusan Nomor 58/Pid/2006/PT.Sby, 15 Agustus 2007.

Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 15/Pdt/2018/PT DPS perihal Banding perkara Gugatan yang diajukan oleh I Ketut Rugeg terhadap perampasan dalam Putusan Nomor 2964K/PID.SUS/2015, 19 April 2018.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, 19 Desember 2017.

C. Karya Ilmiah

Ibrahim, Muhamad Nur, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga terhadap Keberatan atas Putusan Pengadilan dalam Perkara Korupsi", *e Jurnal Katalogis*, Volume IV Nomor 5, Mei 2016.

Martono, Sigit, 2015, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik Sehubungan dengan Penyitaan dan Perampasan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi no. 39/PID.SUS TPK 2013/PN/JKT.PST), *Skripsi*, Universitas Indonesia, Depok.

Permana, Muhammad Rayendra, 2014, Status Hukum Kepemilikan Aset Pihak Ketiga yang Dirampas Melalui Putusan Pengadilan, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sudarto, Yudha Aziiz, 2018, Kedudukan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan terhadap Objek Jaminan yang Disita oleh Negara Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wibowo, Widyanti, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurist-Diction*, Volume II Nomor 5, Agustus 2019.

Widodo, Teddy, "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume VII Nomor 2, Juli 2018.

D. Internet

DA, Ady Thea, 2020, Mendorong Penguatan Perlindungan Harta Pihak Ketiga Beriktikad Baik dalam Perkara Tipikor dan TPPU, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f97f0cbcc328/mendorong->

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Korupsi”, <https://kbbi.web.id/korupsi>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019.

Santoso, Topo, 2011, Urgensi Pembenaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance, diakses melalui <https://bphn.go.id/data/documents/pk-2011-1.pdf> tanggal 20 Agustus 2019.

Suhanda, 2021, Perampasan Aset yang Belum Inkracht Langgar HAM, diakses melalui <https://assets.rri.co.id/nasional/hukum/1130903/perampasan-aset-yang-belum-inkracht-langgar-ham> tanggal 9 Januari 2022.

Susetyo, Heru, 2021, Viktimisasi terhadap Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perampasan Aset Tipikor, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/viktimisasi-terhadap-pihak-ketiga-beritikad-baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-lt610bb4999544a?page=1>) tanggal 9 Januari 2022.

Widianto, Satrio 2021, Pengamat Nilai Perampasan Aset Tak Terkait Kasus Korupsi Melanggar HAM, diakses melalui <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012308884/pengamat-nilai-perampasan-aset-tak-terkait-kasus-korupsi-melanggar-ham?page=2> tanggal 9 Januari 2022.